

# KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PANGKALPINANG DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (Studi di Kelurahan Jerambah Gantung)

Khairun Nisak  
Hendarti Tri Setyo Mulyani  
Deara Shinta Lestari

Accountancy Program  
STIE-IBEK Bangka Belitung  
Pangkalpinang, Indonesia  
[e.jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e.jurnal@stie-ibek.ac.id)

**Abstrak** - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PBB P2 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Upaya Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada 5 responden dalam penelitian ini adalah Lurah, Kasi Pembangunan dan Ketua RT di Kelurahan Jerambah Gantung. Analisis data menggunakan *Data Collection, Data Conclusion, Data Display, Concluding Drawing/Verifikasi*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 Kelurahan Jerambah Gantung sebesar 41.39% dari target 321 Juta mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang sehingga melampaui target sebesar 101,96% dengan target 122,2 miliar. Kemudian Pendapatan ini dianggarkan menjadi APBD yang digunakan untuk Pembangunan diwilayah Kota Pangkalpinang.

**Kata Kunci** : PBB P2, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Realisasi Pajak, Kontribusi Pajak, APBD.

**Abstrak** - *The aim of this research is to determine the contribution of PBB P2 (Land and Building Tax) to the Regional Original Income of Pangkalpinang City in efforts to implement sustainable economic development. This research uses a qualitative approach. The data was collected through unstructured interviews with 5 respondents, consisting of the Village Head, Head of Development, and RT (Neighborhood Association) Chairman in Jerambah Gantung Village. The data analysis used Data Collection, Data Conclusion, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification. The data analysis results show that the contribution of PBB P2 in Jerambah Gantung Village is 41.39% of the target of 321 million, which affects the Regional Original Income of Pangkalpinang City, exceeding the target by 101.96%, with a target of 122.2 billion. This income is then allocated to the Regional Budget (APBD), which is used for development in Pangkalpinang City.*

**Keywords** : *PBB P2, Regional Original Revenue (ROR), Sustainable Economic Development, Tax Realization, Tax Contribution, Regional Government Budget.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai dokumen perencanaan, di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk periode lima tahun. RPJMN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam RPJMN, terdapat berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. Setelah dokumen ini diterbitkan, Pemerintah Pusat Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan dokumen RPJMD.

RPJMD adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode lima tahun. RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan disusun berdasarkan kebutuhan serta potensi daerah. Melalui RPJMD, pemerintah daerah dapat merumuskan program-program yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setelah dokumen RPJMD disahkan

Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan / Kelurahan yang dinaunginya untuk membuat dokumen Renstra. Renstra Kelurahan adalah rencana strategis yang disusun oleh pemerintah kelurahan untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Renstra ini mencakup program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Renstra Kelurahan, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, pembangunan ekonomi berkelanjutan mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mempromosikan energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini juga mencakup pengelolaan limbah yang lebih baik dan penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di sisi sosial, pembangunan ekonomi berkelanjutan mendorong pemerataan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan wilayah perkotaan tetapi juga mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Selain itu, penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Maka, pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan menghargai kelestarian alam untuk generasi mendatang.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan berkaitan dengan pemekaran wilayah terutama dalam pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan publik, mendekatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Kelurahan Jerambah Gantung, sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Pangkalpinang, memiliki potensi besar dalam penerimaan PBB-P2 yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Wilayah ini, meskipun memiliki potensi yang tinggi, dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak yang optimal. Efektivitas pengelolaan PBB-P2 di wilayah ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, serta meningkatkan kontribusi daerah terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, realisasi PBB-P2 sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, mekanisme pemungutan pajak yang kurang efisien, serta kualitas pelayanan administrasi perpajakan yang perlu terus diperbaiki. Selain itu, kontribusi PBB-P2 terhadap total PAD perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami sejauh mana pajak ini memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Pentingnya analisis ini juga terkait dengan pengukuran efektivitas program-program pembangunan yang didanai oleh PAD, dan bagaimana peningkatan penerimaan PBB-P2

dapat berkontribusi dalam mempercepat proses pembangunan yang merata di seluruh wilayah kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan PBB-P2 di Kelurahan Jerambah Gantung serta kontribusinya terhadap PAD Kota Pangkalpinang. Dengan menganalisis hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PBB-P2, memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dan bagaimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan di Kelurahan Jerambah Gantung. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi PBB P2 pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dalam upaya Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

## II. LANDASAN TEORI

Akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan manajer (Sugiarto, 2022). Akuntansi memiliki berbagai cabang, diantaranya ialah akuntansi keuangan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, serta akuntansi manajerial yang mendukung pengambilan keputusan internal oleh manajemen perusahaan. Dalam sektor publik, akuntansi digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti pengeluaran anggaran negara, penerimaan pajak, dan alokasi dana untuk program-program publik. Bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat, dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah atau lembaga publik, yaitu laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan tahunan. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah atau lembaga tersebut memenuhi kewajiban fiskalnya. Dalam sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, akuntansi digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## PERPAJAKAN

Perpajakan adalah salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara yang berkaitan dengan kewajiban setiap individu atau badan hukum untuk menyeter sejumlah uang kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. (Sutrisno, 2023). Perpajakan berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Perpajakan juga berperan dalam mencapai keadilan sosial melalui sistem distribusi pendapatan yang adil. Sistem perpajakan yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dewi & Susanti, 2023). Indonesia menjalankan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem *self-assessment* pada tahun 1967, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses perpajakan mengalami transformasi digital, yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak. Penggunaan *E-Filling* dan *E-Billing* yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal pajak memungkinkan proses administrasi perpajakan lebih cepat dan transparan, serta mengurangi potensi kebocoran pajak (Putra & Aditya, 2022.) Sistem ini diharapkan dapat dipahami dengan baik sesuai peraturan perpajakan dan akuntansi untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.

Dalam pengelolaannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

### 1. Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jenis – Jenis pajak yang dikelola Pemerintahan Pusat sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah.
- Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memuat nilai uang di atas jumlah tertentu.

### 2. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk keperluan daerah. Jenis – Jenis pajak yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Air Tanah
- Pajak Gedung Walet
- Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

## PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri. Pendapatan tersebut berasal dari sektor pajak, retribusi, atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kemandirian fiskal bagi daerah, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan memungkinkan daerah untuk mengelola keuangan mereka secara lebih fleksibel (Soetomo, 2023).

## PENGELUARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dana yang dialokasikan dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh secara mandiri oleh daerah itu sendiri. Pengeluaran ini mencakup biaya operasional pemerintah daerah dan kegiatan pembangunan yang menggunakan PAD sebagai sumber biaya utama.

Untuk mengukur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas pengelolaannya, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa indikator yang relevan :

- Persentase Realisasi PAD
- Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
- Standar Indikator Kinerja Administrasi Pajak Daerah (Sikap)
- Tax Buoyancy
- Tax Elasticity
- Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
- Upaya Pajak
- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
- Indikator Penerimaan Pajak
- Tambahan Penerimaan Pajak
- Jumlah Piutang Pajak Daerah
- Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
- Laju Pertumbuhan

Beberapa contoh pengeluaran yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Pelayanan Publik
- Pembayaran Gaji ASN (Aparatur Sipil Negara)
- Program Pengetasan Kemiskinan
- Keamanan dan Ketertiban
- Pemberdayaan Ekonomi Daerah
- Pengelolaan Lingkungan
- Pembangunan Sosial dan Budaya

### PBB P2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Pangkalpinang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak ini terdiri dari dua kategori, yaitu PBB Perkotaan dan PBB Perdesaan. PBB Perkotaan dikenakan pada properti yang berada di kawasan

perkotaan, sementara PBB Perdesaan dikenakan pada properti yang ada di kawasan pedesaan. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PBB P2 berfungsi untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah tersebut (Murniati, 2020). Hal ini sesuai dengan tujuan utama pajak, yaitu untuk mendukung pembangunan daerah, baik dari sektor infrastruktur maupun sektor sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kota Pangkalpinang. Sebagai pajak yang bersifat langsung, PBB P2 dikenakan kepada setiap individu atau badan yang memiliki atau menguasai objek pajak berupa tanah dan bangunan. Objek pajak ini meliputi berbagai jenis properti, mulai dari rumah tinggal, gedung perkantoran, hingga lahan pertanian yang berada dalam area wilayah suatu daerah.

PBB P2 juga berfungsi untuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi mereka dalam mendanai pembangunan daerah. Dalam konteks ini, PBB P2 tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah, tetapi juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini. Oleh karena itu, setiap pembayaran PBB P2 yang tepat waktu dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih merata, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan (Sulaiman & Kurniawan, 2021).

#### **PBB P2 SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH**

Salah satu komponen PAD yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2). PBB P2 tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah. Semakin berkembangnya sektor properti, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, semakin besar pula kontribusi PBB P2 terhadap PAD. Oleh karena itu, pengelolaan PBB P2 yang optimal dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Di Kota Pangkalpinang, sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, baik dari segi sektor perumahan, komersial, maupun industri, pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan adanya perkembangan properti yang signifikan, seperti pembangunan perumahan baru, pusat perbelanjaan, serta gedung perkantoran, potensi penerimaan dari PBB P2 semakin besar. Berdasarkan data yang ada, kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan keberhasilan pengelolaan sektor properti yang ada di daerah tersebut (Rahayu, 2021). Namun, meskipun PBB P2 berkontribusi besar terhadap PAD, tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak ini tetap ada. Salah satunya adalah ketidaktepatan dalam pemetaan objek pajak, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih baik melalui

pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu. Selain itu, penting bagi pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memastikan bahwa pendapatan dari PBB P2 digunakan dengan efisien dan transparan. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa dana yang berasal dari PBB P2 dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pendanaan untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kota Pangkalpinang memberikan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan PBB P2 yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

#### **PENGELUARAN PBB P2**

Pengeluaran PBB P2 merupakan biaya yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan administratif dan operasional terkait pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa contoh pengeluaran yang dapat dibiayai dengan Pengeluaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi dan Pengelolaan PBB
2. Biaya untuk Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
3. Biaya Infrastruktur dan Teknologi
4. Penggunaan Dana untuk Pembangunan Daerah

Pengeluaran PBB P2 tidak hanya untuk kepentingan administratif yang dianggarkan untuk memungut pajak, tetapi juga mencakup untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### **IMPLEMENTASI PBB P2 DI KOTA PANGKALPINANG**

Dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Pangkalpinang, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah agar pengumpulan pajak ini dapat optimal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakakuratan data objek pajak yang dapat menghambat pemungutan pajak yang tepat dan adil. Data objek pajak yang tidak terupdate secara rutin atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sehingga potensi pendapatan daerah tidak teroptimalkan (Mulyadi, 2020). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak menjadi hambatan besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya PBB P2, baik untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah maupun untuk kesejahteraan bersama. Upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis pada pendekatan yang mudah dipahami perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak ini (Sari, 2020).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan pajak. Sistem administrasi pajak yang masih banyak mengandalkan metode manual menyebabkan ketidakmampuan dalam memperbarui data objek pajak secara cepat dan tepat, serta memperlambat proses pemungutan pajak itu sendiri (Rizal, 2021). Selain itu, akses terbatas di daerah pedesaan juga menjadi kendala dalam penyebaran informasi mengenai kewajiban pajak. Masyarakat di wilayah pedesaan yang sulit mengakses informasi tentang PBB P2 sering kali tidak membayar pajak karena ketidaktahuan atau keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang relevan (Kurniawan, 2018). Di sisi lain, ketidakseimbangan pembagian beban pajak antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah, di mana objek pajak di daerah perkotaan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan pedesaan, yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembayaran pajak (Sutrisno, 2016).

Untuk mengukur penerimaan PBB P2 serta efektivitas pengelolannya, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa indikator yang relevan :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2. Tingkat Realisasi Penerimaan PBB P2
3. Tingkat Keterlambatan Pembayaran PBB P2
4. Tingkat Ketepatan Penetapan dan Penghitungan PBB P2
5. Tingkat Penyelesaian Sengketa PBB P2
6. Tingkat Penyuluhan dan Edukasi Wajib Pajak
7. Tingkat Digitalisasi dalam Pengelolaan PBB P2
8. Rasio PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Indeks Kepuasan Wajib Pajak
10. Tingkat Akurasi Data dan Basis Data Objek Pajak
11. Tingkat Perolehan Objek Pajak Baru

#### **UPAYA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG MENINGKATKAN KONTRIBUSI PBB P2**

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemungutan PBB P2 sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain adalah peningkatan sistem pendataan objek pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembayaran pajak, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan kota. Menurut laporan Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang (2023), penerapan sistem pembayaran PBB P2 secara online dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Selain itu, pemerintah Kota Pangkalpinang juga telah memperkenalkan berbagai program insentif untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar PBB P2, seperti pemberian diskon bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Program ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan meningkatkan tingkat partisipasi dalam pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak swasta dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang lebih luas, termasuk melalui media sosial dan platform digital, untuk memastikan informasi terkait kewajiban pajak dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Tak hanya itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pajak juga menjadi fokus utama pemerintah. Pelatihan bagi petugas pajak dilakukan secara berkala untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal peraturan perpajakan terbaru serta kemampuan dalam menggunakan teknologi yang diterapkan dalam sistem administrasi pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemungutan PBB P2 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

#### **PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka menengah, baik tingkat nasional maupun daerah. RPJMN disusun oleh pemerintahan pusat bertujuan untuk menciptakan arah pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. RPJMD disusun oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

RPJMN dan RPJMD mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri dari empat pilar yang menjadi acuan dalam penyusunan kedua dokumen tersebut agar pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Berikut 4 Pilar SDGs :

1. Pilar Sosial  
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, serta menyediakan pendidikan dan kesehatan berkualitas.
2. Pilar Ekonomi  
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Pilar Lingkungan  
Meningkatkan perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta mitigasi perubahan iklim
4. Pilar Institusional  
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam implementasinya, RPJMN dan RPJMD menggunakan 17 indikator SDGs untuk memantau kemajuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator tersebut sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Pilar dan 17 Indikator SDG'S**



Sumber : Suharto, 2017

Pembangunan ekonomi berkelanjutan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Menurut Suharto (2017), optimalisasi penerimaan PBB P2 dapat memberikan dana yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang penting untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat, PBB P2 dapat menjadi instrumen penting dalam mendanai program pembangunan yang mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang di daerah.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki standar hidup, tanpa merusak lingkungan hidup atau menghabiskan sumber daya alam yang ada (UNEP, 2018). Dalam konteks ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dapat berperan sebagai instrumen penting untuk mendanai pembangunan yang mendukung keberlanjutan tersebut.

PBB P2, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, memiliki potensi untuk digunakan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan sosial. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan pendapatan PBB P2 untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, proyek seperti transportasi publik yang efisien dan berbasis energi terbarukan dapat dikembangkan, yang tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Selain itu, pendapatan dari PBB P2 juga dapat digunakan untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti pembangunan tempat pembuangan sampah terpisah dan fasilitas daur ulang yang dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran PBB P2 untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh warga. Penyuluhan dan sosialisasi yang baik mengenai manfaat PBB P2 tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan pengelolaan PBB P2 yang efektif dan efisien, Kota Pangkalpinang tidak hanya akan dapat meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, PBB P2 dapat berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan antara kebutuhan finansial daerah dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita
2. Indeks Kesejahteraan Sosial
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)
5. Indeks Lingkungan
6. Emisi Karbon (CO2) per PDB
7. Penggunaan Sumber Daya Alam
8. Investasi Dalam Energi Terbarukan
9. Indeks Keadilan Sosial
10. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan
11. Keberlanjutan keuangan Publik
12. Indeks Ketahanan Sosial

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang yang beralamatkan di Jalan Raya Kerabut RT.003 RW.001 Kel. Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung. Waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Februari 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025.

#### METODE PENGUMPULAN DATA

##### Wawancara

Peneliti melakukan Wawancara secara langsung yang digunakan dalam bentuk wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiono, 2018). Wawancara dilakukan kepada Lurah Jerambah Gantung dan Kasi Pembangunan dalam pengelolaan PBB P2, kepada masyarakat atau wajib pajak, seperti ketua RT/RW setempat dan masyarakat yang membayar PBB P2 di Kelurahan Jerambah Gantung. Wawancara ini menggunakan panduan wawancara terbuka yang memungkinkan partisipan memberikan jawaban yang komprehensif untuk menggali pemahaman tentang kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan dampaknya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kelurahan Jerambah Gantung.

### Observasi

Metode pengumpulan data observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena atau perilaku yang diteliti. Pada penelitian ini Peneliti melakukan observasi langsung tidak terstruktur karena observasi tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Di Kelurahan Jerambah Gantung peneliti mempelajari proses administrasi dan pengelolaan PBB P2 secara langsung di Kelurahan tersebut, berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah setempat terkait pembayaran pajak, serta mempelajari kebijakan pajak dan implementasinya yang berdampak pada pembangunan ekonomi di tingkat kelurahan.

### Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman video, atau arsip lain yang sudah ada. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data wajib pajak dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jerambah Gantung dengan melihat buku Wajib Pajak Tahunan yang ada di Kelurahan Tersebut. Serta pengambilan Foto dan arsip yang ada untuk pembangunan tahunan dengan dana yang telah dialokasikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.

### TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan memahami kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pangkalpinang, khususnya di Kelurahan Jerambah Gantung, serta peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Langkah – langkah analisis data sebagai berikut :

#### 1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap ini peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dicatat, yang didengar direkam. Sehingga peneliti memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

#### 2. Data Reduction (Reduksi data)

Setelah mengumpulkan data yang jumlahnya cukup banyak di lapangan peneliti akan mereduksi data dengan kata lain merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Maka, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali apabila masih diperlukan.

#### 3. Data Display (Penyajian Data)

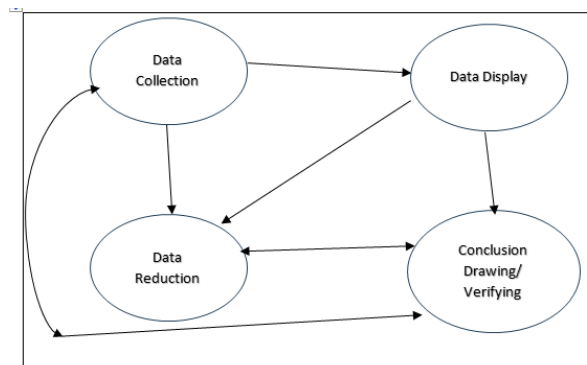
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Selanjutnya dalam melakukan penyajian data, selain tulisan yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

#### 4. Conclusion Drawing / Verifikasi

Langkah ke empat dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

**Gambar 2**  
**Teknik Analisis Data**



Sumber : Data diolah oleh peneliti

## IV. PEMBAHASAN

### KONTRIBUSI PBB P2 PADA KELURAHAN JERAMBA GANTUNG

Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara tidak terstruktur oleh Lurah Jerambah Gantung bahwa Tingkat realisasi PBB P2 di Kelurahan Jerambah Gantung tergolong rendah dengan realisasi 41,39% jawaban yang sama pula di utarakan oleh Kasi Pembangunan dan Ketua RT di Kelurahan Jerambah Gantung. Faktor yang mempengaruhinya beragam salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, hingga data wajib pajak tidak akurat. Adapun strategi khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penagihan manual dari rumah ke rumah yang dikoordinir oleh petugas pengelola PBB P2 Kelurahan dan memanfaatkan media informasi untuk penagihan secara online.

Tingkat realisasi PBB P2 beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan namun, untuk tahun 2024 hanya

mencapai 41,39% dari target 321 Juta Rupiah, ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kendala yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB P2 ini kesadaran masyarakat yang masih rendah, sehingga menganggap kewajiban membayar PBB P2 ini bukan suatu prioritas, kurangnya akses informasi dan pemahaman warga tentang manfaat pajak bagi pembangunan lingkungan, dan pendataan NOP belum sepenuhnya akurat. Sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penagihan secara langsung melalui media informasi serta menjadwalkan rapat bulanan untuk berkoordinasi dengan ketua RT agar ketua Rt dapat mengingatkan langsung kepada masyarakat yang belum membayar pajak dari rumah ke rumah.

Tingkat realisasi PBB P2 tahun 2024 dibandingkan target yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, namun untuk Tahun 2024 Kelurahan Jerambah Gantung hanya mencapai 41,39% dari target yang ditetapkan ini mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga perlu perbaikan strategi distribusi dan penagihan PBB P2. Kendala yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan disebabkan karena kesadaran masyarakat masih rendah, yang menganggap PBB P2 Sebagai bukan sebagai kewajiban prioritas, kurangnya akses informasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan lingkungan, juga data objek pajak belum mutakhir, wajib pajak tidak tinggal di alamat objek pajak sehingga sulit dihubungi dan keterbatasan SDM untuk melakukan monitoring dan penagihan secara intensif, ada juga warga yang merasa nilai pajaknya terlalu tinggi dan kurangnya pemahaman tentang sanksi keterlambatan. Langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dengan menghimbau RT/RW dan tokoh masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat pentingnya membayar PBB P2, pembaharuan data NOP melalui pendataan ulang kepada Ketua RT dan koordinasi dengan kecamatan penagihan administratif dan ketua RT mendistribusikan SPPT PBB P2 secara langsung dari rumah ke rumah masyarakat sekaligus mengingatkan kepada wajib pajak. Tren keterlambatan pembayaran PBB P2 oleh wajib pajak cenderung sama dari tahun ke tahun yaitu sebagian besar wajib pajak menunda hingga melawati jatuh tempo atau bahkan tidak membayar sama sekali. Alasan umum yang disampaikan kurangnya pemahaman tentang batas waktu pembayaran dan menganggap nominal pajak kecil, sehingga tidak menjadi prioritas dan ada yang merasa tidak mendesak karena tidak ada tagihan rutin juga beberapa masyarakat lansi yang tidak paham sistem pembayaran digital hingga SPPT tidak diterima tepat waktu karena alamat tidak sesuai. Sanksi yang ditetapkan untuk mengatasi keterlambatan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sanksi denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dan penghapusan denda apabila ada pemutihan PBB P2.

Proses penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan perhitungan kewajiban pajak dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang melalui proses pendataan dan pemetaan objek pajak secara berkala. NJOP digunakan sebagai dasar perhitungan besaran PBB P2 tiap tahunnya. Penetapan yang dilakukan

secara umum akurat. Namun, jika dilapangan nilai NJOP tidak sesuai dengan kondisi objek pajak terkini misalnya tanah kosong yang sudah dibangun atau rumah yang berubah fungsi wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembaruan ke BAKEUDA jika merasa NJOP dirasa terlalu tinggi. Sistem digital yang digunakan dalam proses pengelolaan dan SPPT sudah menggunakan sistem SIKAP (Sistem Informasi Keuangan dan Aset Pajak) yang terintegrasi secara digital seperti penetapan, pencatatan dan pemantauan pembayaran sudah melalui aplikasi berbasis web. Namun, pendistribusian SPPT dan penyampaian informasi masih dilakukan secara manual. Penyuluhan sudah rutin dilakukan setiap tahun terutama menjelang masa pembayaran PBB P2 kami sampaikan informasi melalui pertemuan warga surat edaran dan kerjasama dengan RT/RW kami sudah berupaya aktif edukasi baik melalui pembagian SPPT pemasangan *banner* sehingga sosialisasi langsung ke masyarakat tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu belum semua warga bisa terjangkau secara maksimal. Media atau metode yang paling efektif sejauh ini adalah komunikasi langsung lewat RT/RW dan pertemuan warga yang membuat warga lebih mudah menerima jika dijelaskan langsung dan ada kesempatan untuk bertanya. Untuk media cetak seperti brosur atau selebaran itu kurang efektif jika tidak dibarengi dengan pendekatan *personal*.

Kendala dalam sosialisasi kewajiban dan hak wajib pajak ini kurangnya kesadaran dan pemahaman warga terhadap fungsi PBB P2 dan juga warga yang merasa nilai PBB P2 nya itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka sehingga menunda pembayaran, keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan juga masyarakat yang belum memahami prosedur. Jika ingin mengajukan keberatan atau konsultasi Pengelolaan PBB P2 sudah mulai mengarah ke sistem digitalisasi terutama untuk pembayaran yang sudah bisa dilakukan melalui bank, *e-commerce* dan *m-banking* namun untuk pendataan dan penagihan sebagian besar masih berjalan secara manual di tingkat Kelurahan dan RT. Digitalisasi berdampak positif yaitu memudahkan wajib pajak karena bisa membayar dari rumah tanpa harus ke bakuda atau bank. Dari sisi pemerintah sistem ini juga membantu dalam pemantauan realisasi pembayaran secara *Real Time* sehingga sangat menghemat waktu Selain itu lebih transparan namun efektivitasnya baru terasa di kalangan warga yang sudah paham digital terutama generasi muda karena mereka tidak perlu antri atau datang ke tempat pembayaran tapi bagi warga lansia atau belum *familiar* tetap perlu pendampingan secara manual kendala yang masih dihadapi dalam implementasi sistem digital yaitu kesenjangan literasi digital masih banyak warga terutama usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran online Selain itu jaringan internet di beberapa titik masih belum stabil sehingga sistem *down* Atau tidak sinkron antara data pusat dan daerah. Namun, ada pula warga yang tetap minta bukti fisik pembayaran padahal sistem sudah otomatis. Saat ini data informasi yang diterima kontribusi PBB P2 terhadap total pad berada di kisaran yang signifikan namun masih belum optimal dengan realisasi 41,39% dari target 321 juta di wilayah Kelurahan Jerambah Gantung kontribusi tersebut relatif stagnan dalam 5 tahun terakhir ada peningkatan kecil di beberapa tahun tetapi tidak signifikan kondisi pandemi dan kesadaran

masyarakat yang masih rendah menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan rasio tersebut.

kami mendorong peningkatan dengan memperkuat sosialisasi dan memperbaiki pelayanan distribusi SPPT PBB P2 serta bekerja sama lebih erat dengan RT/RW dalam penagihan edukasi juga terus ditingkatkan agar masyarakat sadar pentingnya kontribusi ini optimalisasi penagihan melalui data digital pemberian himbauan langsung dan evaluasi terhadap NJOP agar lebih adil dan aktif mengingatkan masyarakat melalui WhatsApp pertemuan warga atau pada saat ketua RT melakukan pembagian SPPT PBB.

Secara formal survei kepuasan masyarakat belum rutin dilakukan di tingkat Kelurahan namun kami sering menerima masukan langsung dari masyarakat baik melalui forum warga media sosial kelurahan maupun saat pelayanan langsung kami menjadikan semua aduan pertanyaan dan masukkan masyarakat yang datang ke kantor Kelurahan sebagai bagian dari evaluasi internal walaupun belum dalam bentuk survei tertulis. Aspek layanan yang paling sering dikeluhkan adalah penyesuaian NJOP yang dianggap terlalu tinggi oleh sebagian masyarakat serta kurangnya pemahaman soal proses keberatan namun warga juga mengapresiasi kemudahan pembayaran digital yang makin terbuka Tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil survei kepuasan tersebut dengan terus meningkatkan sosialisasi khususnya tentang dasar penetapan NJOP dan prosedur keberatan.

Selain itu kami juga mendorong petugas untuk lebih komunikatif dalam memberikan penjelasan ke masyarakat tidak lanjut itu berupa peningkatan layanan konsultasi langsung penyedia informasi melalui media sosial dan papan informasi dibantu dengan ketua RT yang menjembatani keluhan warga agar bisa ditangani cepat oleh petugas kelurahan atau petugas pajak. Dalam menemukan atau mendaftarkan objek pajak baru strategi yang kami gunakan dengan pemantauan pembangunan fisik baru di wilayah Kelurahan Jerambah Gantung baik bangunan permanen maupun renovasi besar, kami juga mengarahkan perangkat kelurahan bidang terkait dan ketua RT untuk melaporkan secara berkala jika ada rumah baru lalu perangkat kelurahan yang membidangi akan melakukan kunjungan lapangan serta mencocokkan data pembangunan dari perizinan yang masuk ke kelurahan jika ditemukan bangunan baru yang belum terdaftar akan dibantu difasilitasi pengajuan dan pencatatan ke Bakeuda. Kontribusi dari objek pajak baru memang belum terlalu besar tetapi penting sebagai potensi jangka panjang menambah basis objek pajak baru menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan PBB P2. Kerjasama lintas instansi untuk mendukung pencapaian ini seperti koordinasi dengan kecamatan dan BPN saat pembuatan legalitas objek pajak dan bakuda untuk sinkronisasi data PBB P2.

### **KONTRIBUSI PBB P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Meskipun tingkat realisasi PBB P2 di Kelurahan Jerambah Gantung rendah, kontribusi PBB P2 tetap memiliki dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pangkalpinang.

Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan angka yang positif bahkan pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah melebihi target namun di tingkat Kelurahan Jalan bergantung khususnya PBB P2 relaksasinya masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai 41,39% dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil mengelola sumber-sumber PAD dengan cukup efektif meskipun di tingkat Kelurahan tertentu seperti Kelurahan Jerambah Gantung masih terdapat tantangan yang harus diatasi faktor yang mempengaruhi capaian terhadap target PAD itu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak banyak warga yang belum menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu, kemampuan ekonomi masyarakat kondisi ekonomi warga yang beragam turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak, validitas data objek pajak masih terdapat objek pajak yang belum terdaftar atau belum diperbarui datanya sehingga mempengaruhi potensi penerimaan, keterbatasan sistem pembayaran sebagian warga kesulitan mengakses metode pembayaran digital atau belum terbiasa dengan sistem pembayaran online keterlibatan RT dan perangkat kelurahan peran ketua RT sangat penting dalam distribusi SPPT PBB P2 dan mendorong warganya untuk taat pajak namun masih perlu penguatan SDM dan koordinasi.

Langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan proporsi PAD yaitu memfokuskan pada pembaruan pendataan objek pajak memperluas cakupan wajib pajak serta menggencarkan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat agar kesadaran meningkat, digitalisasi sistem pajak, validasi data NJOP serta koordinasi lintas instansi termasuk dengan RT/RW untuk menemukan objek pajak baru. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah cukup signifikan, realisasi pajak daerah Kota Pangkalpinang yang melebihi target menunjukkan bahwa PAD menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang dapat diandalkan khususnya dari sektor perpajakan seperti PBB P2 yang memberi andil nyata terhadap pendapatan daerah untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah berdasarkan persentase yang dicapai pada di atas 100% dari target menunjukkan Kota Pangkalpinang semakin mandiri secara fiskal menjadi indikator bahwa daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat..

Langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan proporsi PAD yaitu dengan fokus pada pembaruan pendataan objek pajak memperluas cakupan wajib pajak serta menggencarkan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat agar kesadaran meningkat. Dalam menilai kinerja pengelolaan pajak secara bertahap Kota Pangkalpinang mulai menerapkan indikator SIKAP dalam menilai kinerja pengelolaan pajak termasuk PBB P2 yang membantu kami di kelurahan untuk melihat seberapa jauh efektivitas distribusi dan penagihan pajak, Khususnya dalam hal realisasi, akurasi data, dan ketepatan waktu penyampaian SPPT serta pelaporan.

Sistem administrasi pajak daerah saat ini dalam hal akurasi sudah mengalami perbaikan terutama setelah digitalisasi sistem pembayaran, entri data dan pelaporan sehingga proses lebih efisien tapi akurasi data objek pajak di lapangan masih menjadi PR sehingga akurasinya belum maksimal. Tantangan utama dalam penerapan standar SIKAP di lapangan yaitu terbatasnya SDM terlatih dan belum sepenuhnya tersedia data yang akurat dan terkini sehingga belum terintegrasi dengan baik dan kurangnya

pemahaman petugas lapangan terkait indikator hal ini menghambat pencapaian target sesuai indikator sikap.

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah merespon pertumbuhan ekonomi di daerah belum sepenuhnya sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di lapangan meski aktivitas ekonomi warga meningkat terutama di sektor UMKM dan properti realisasi PBB P2 masih dibawah 50% artinya belum optimal menangkap potensi ekonomi tersebut struktur pajak daerah Masih cenderung statis. penyesuaian NJOP atau kebijakan tarif belum fleksibel mengikuti dinamika ke ekonomi masyarakat dalam beberapa kasus NJOP justru dianggap memberatkan saat daya beli turun misalnya pasca pandemi. Saat harga tanah naik tapi data PBB P2 belum diperbarui sebaliknya warga terdampak inflasi tidak ada penyesuaian keringanan struktur pajak belum menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada penghasilannya turun tapi tetap mendapat tagihan yang sama. Untuk menilai ketahanan *resilient* sistem perpajakan terhadap fluktuasi ekonomi ketahanannya masih terbatas saat ekonomi melemah realisasi pajak cenderung menurun karena masyarakat menunda pembayaran belum ada skema insentif atau perlindungan yang cukup kuat agar penerimaan tetap stabil dalam kondisi krisis.

Jadi sistem perpajakan daerah terutama PBB P2 belum cukup tangguh menghadapi fluktuasi ekonomi. Penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya meningkat secara proporsional dengan kenaikan PDRB meskipun ekonomi di wilayah Kelurahan Jerambah Gantung tumbuh realisasi PBB P2 menunjukkan masih ada potensi pajak yang belum tergarap.

Hal ini dikarenakan beberapa objek pajak belum terdata atau belum tertagih secara maksimal untuk menilai kepekaan sistem pajak terhadap perubahan basis ekonomi sistem pajak daerah masih kurang responsif terhadap dinamika ekonomi penyesuaian nilai NJOP dan pengelolaan data objek pajak terkadang terhambat kepekaan sistem masih perlu ditingkatkan data dan tarif pajak belum selalu diperbarui sesuai perubahan ekonomi lokal sehingga penerimaan pajak belum optimal untuk mencerminkan basis ekonomi yang berkembang langkah yang diambil jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan pajak dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Selain itu, dengan mendorong koordinasi dengan BAKEUDA untuk memperbaiki data dan mempercepat pendataan objek pajak baru melalui verifikasi lapangan mempermudah proses pembayaran dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penagihan. Di tingkat Kota Pangkalpinang realisasi pajak daerah mendekati bahkan melampaui target secara konsisten indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pemungutan pajak daerah yaitu persentase realisasi terhadap target ketepatan waktu pembayaran dan jumlah wajib pajak aktif.

Selain itu, partisipasi masyarakat dan akurasi data objek pajak juga menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi upaya penagihan dan pengawasan terhadap wajib pajak evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat kelurahan dan laporan dari kasih pembangunan pelaku pengelola PBB di Kelurahan Jerambah Gantung Serta ketua RT dengan menganalisis data SPPT yang belum dibayar dan bekerja sama dengan ketua RT untuk mengingatkan langsung ke masyarakat bila perlu didatangi langsung wajib

pajak yang menunggak untuk memberi pemahaman lebih lanjut upaya optimalisasi pajak daerah dilakukan di tengah keterbatasan sumber daya dengan melakukan pemetaan wilayah prioritas dengan realisasi rendah serta mengoptimalkan peran ketua RT dalam sosialisasi. keterbatasan SDM kami atasi dengan sistem kerja kolaboratif antar perangkat kelurahan, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembayaran *online* sangat membantu terutama karena keterbatasan personil lapangan dan juga meningkatkan koordinasi dengan BAKEUDA untuk *update* data secara berkala agar lebih tepat sasaran. Potensi pajak daerah yang telah tergarap saat ini secara makro realisasi Pajak Kota Pangkalpinang telah melampaui target namun di tingkat kelurahan masih ada potensi yang belum tergarap maksimal terutama dari objek pajak baru dan wajib pajak yang belum terdata yang menjadi fokus ke depannya yang mendorong peningkatan *tax effort* Dengan penetapan target yang lebih realistis dan pemberian *reward* untuk kelurahan atau ketua RT dengan pencapaian tertinggi. Kebijakan integrasi data dengan OPD lain seperti pertanahan atau BPN dan Kecamatan sangat penting. Edukasi dan pemberitahuan pajak melalui *Whatsapp* atau media sosial juga mulai diterapkan dan menyarankan adanya penyuluhan langsung dan pemberian sosialisasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan warga untuk membayar pajak.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB saat ini dikelola oleh pemerintah Kota Pangkalpinang namun dari sisi Kelurahan kontribusi pajak seperti PBB P2 masih belum mencerminkan potensi ekonomi lokal yang sesungguhnya jika melihat realisasi pajak yang sudah melampaui target kemungkinan rasio pajak terhadap PDRB membaik rasio ini belum sepenuhnya mencerminkan potensi fiskal daerah yang sebenarnya karena banyak objek pajak yang belum terdata secara optimal. Potensi fiskal bisa lebih tinggi jika berbasis data diperbarui dan kesadaran masyarakat meningkat kami yakin potensi fiskal Pangkalpinang lebih besar dari yang tercermin dalam rasio saat ini strategi daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap PDRB dengan meningkatkan akurasi data pajak memperkuat distribusi SPPT PBB P2 secara tepat waktu serta melakukan sosialisasi intensif masyarakat melalui RT dan juga mendorong penggunaan teknologi seperti sistem pembayaran online dan integrasi data antar instansi setelah itu pendataan ulang objek pajak menjadi prioritas kedepannya indikator yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan penerimaan pajak daerah yang dipantau saat ini adalah persentase realisasi terhadap target, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan rasio penyaluran SPPT yang berhasil diterima masyarakat serta pertumbuhan penerimaan dan perbandingan antar Kelurahan.

Sistem pelaporan yang rutin digunakan untuk memantau indikator ini dengan menerima laporan bulanan dari bakeuda melalui kecamatan koordinasi rutin juga dilakukan lewat forum lalu pelaporan dilakukan secara digital dan manual setelah itu kami rekam data realisasi PBB P2 untuk disampaikan ke ketua RT hasil pemantauan tersebut digunakan untuk menetapkan fokus di wilayah dengan capaian rendah program edukasi warga yang lebih tepat sasaran menyusun strategi pengumpulan yang lebih efisien seperti sistem *door to door* sumber tambahan penerimaan pajak yang berhasil digali dalam beberapa tahun ini seperti piutang pajak terutama dari PBB P2.

Selain itu penertiban dan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki NJOP secara resmi turut meningkatkan basis pajak. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang digunakan seperti penagihan aktif penyampaian SPPT langsung ke wajib pajak serta penyuluhan kemasyarakatan. Sedangkan untuk ekstensifikasinya kami aktif dalam pemutakhiran data objek pajak dan identifikasi objek pajak baru. Terkait dengan kebijakan penghapusan piutang pajak untuk saat ini tidak ada kebijakan penghapusan piutang pajak namun dapat dilakukan verifikasi lapangan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat difasilitasi untuk dibantu pengajuannya ke BAKEUDA Kota Pangkalpinang. Kontribusi pajak daerah terhadap total PAD di Kota Pangkalpinang kontribusi pajak sangat signifikan dengan realisasi mencapai 101,96% dengan target 122,2 miliar jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar antara lain : pajak tenaga listrik, makanan atau minuman, BPHTB, dan PBB P2.

Jika dilihat prospek kontribusi ini dalam jangka panjang itu cukup baik terutama jika pembangunan dan sektor ekonomi terus tumbuh asalkan ada penguatan edukasi dan pendataan kontribusi akan stabil dan dengan digitalisasi kemudahan akses pembayaran dan pembukaan wilayah baru basis pajak akan terus berkembang dalam jangka panjang. Tren pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat walaupun ada fluktuasi saat pandemi.

Tahun 2024 menunjukkan capaian yang baik dengan melampaui target pertumbuhan stabil dengan titik lemah di piutang dan objek pajak yang belum maksimal sehingga perlu perhatian lanjutan di sektor ini faktor utama yang mendorong atau menghambat pertumbuhan pajak daerah antara lain untuk faktor pendukung pembangunan wilayah digitalisasi dan sosialisasi aktif dan yang menjadi penghambatnya itu adalah kesadaran warga dan data yang belum akurat sehingga memerlukan koordinasi lintas OPD dan pembaruan sistem digital dan intensifikasi lapangan. strategi yang mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan itu dengan terus mendorong edukasi pembaruan data dan memperkuat peran RT atau RW sebagai penghubung langsung ke masyarakat nah optimalisasi data dan peningkatan kapasitas SDM dan bersinergi antar instansi serta kepatuhan wajib pajak adalah kunci keberlanjutan.

## **UPAYA IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI KEBERLANJUTAN**

Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan Ekonomi yang berkelanjutan. Pendapatan PBB P2 dapat dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk rumah tidak layak huni bantuan kesehatan dan sebagainya melalui dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas permukiman. Mekanisme pengurangan atau pembebasan PBB P2 untuk warga miskin hingga saat ini tidak ada namun pernah dilakukan penghapusan denda PBB P2 bagi Wajib pajak yang menunggak.

Dari retribusi PBB P2 dapat dialokasikan ke Dinas Perikanan dan dinas pertanian yang selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk pemberian bantuan berupa bibit perikanan dan pertanian bagi kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat untuk mendukung program

ketahanan pangan dan pemberdayaan pertanian dan perikanan lokal. Untuk mendukung Kehidupan Sehat dan Sejahtera dana tersebut biasanya dialokasikan ke Dinas Kesehatan maupun dinas permukiman untuk pemberian layanan kesehatan maupun sanitasi masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan pembuatan MCK layak bagi rumah yang tidak memiliki layak sanitasi yang dialokasikan dari dana PAD untuk Kelurahan Jerambah Gantung APBD Kota Pangkalpinang yang diserap melalui PAD banyak dilakukan untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti perbaikan gedung SD maupun SMP ini merupakan kontribusi nyata dari penerimaan PBB 2 dalam mendukung fasilitas pendidikan di wilayah Kelurahan Jerambah Gantung. Program pembangunan yang dibiayai PAD mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan seperti pengadaan kegiatan Posyandu kelompok wanita Tani (KWT) yang bekerja sama dengan Dasa Wisma dan PKK Kelurahan. Untuk mendukung air bersih dan sanitasi hingga saat ini tidak ada pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur air bersih yang dibiayai dari PAD atau PBB P2 karena fasilitas air bersih langsung disediakan oleh PDAM maupun sumur pribadi. APBD yang disalurkan melalui Dinas Perhubungan digunakan untuk membangun lampu jalan dan lampu lalu lintas ini merupakan program listrik alternatif atau penerangan jalan di kelurahan yang berasal dari PAD yang mewujudkan energi bersih dan terjangkau.

Anggaran APBD digunakan untuk memberikan bantuan sertifikat halal dan pendaftaran nib secara gratis dengan dipermudahkannya perkembangan UMKM maka peluang lapangan pekerjaan pun meningkat ini merupakan kontribusi PBB terhadap pembiayaan Program ekonomi lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan PBB P2 digunakan untuk membangun jalan, drainase jembatan, Plat Decker dan lampu jalan lalu lintas melalui dinas terkait untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di kelurahan jerambah gantung. untuk mengurangi kesenjangan belum ada kebijakan PBB P2 yang mempertimbangkan keadilan sosial dan pengurangan beban masyarakat rentan karena kebijakan pembayaran PBB P2 itu berdasarkan NJOP di mana tidak membedakan masyarakat mampu maupun rentan namun pihak kelurahan dapat memfasilitasi untuk permohonan keberatan pembayaran PBB P2 kepada masyarakat tidak mampu ke bakuda dengan pertimbangan tertentu. Sejauh ini Penerimaan PBB P2 yang mendukung penataan permukiman dan kebersihan lingkungan di Kelurahan Jerambah Gantung merupakan program pada Disperkim dalam bentuk pembangunan drainase dan ruang terbuka hijau mendukung lingkungan yang bersih dan penataan yang rapi. Di kelurahan untuk pengelolaan sampah atau program daur ulang yang didukung dana PBB atau PAD sejauh ini hanya program Satgas smile yang dialokasikan dari anggaran APBD untuk pengelolaan sampah namun belum sampai tahap daur ulang atau 3R.

Dalam hal penanganan perubahan iklim dana dari PBB P2 yang digunakan untuk program penghijauan, resapan air atau penanggulangan banjir berupa perbaikan dan pembangunan drainase serta pembangunan ruang terbuka hijau di perumahan subsidi di Kelurahan Jerambah Gantung. Jika dilihat dari sudut pandang ekosistem laut wilayah Kelurahan jerambah gantung tidak relevan dengan

wilayah pesisir karena belum terdapat program pelestarian kawasan mangrove namun untuk ekosistem daratan dana PBB P2 atau PAD mendukung program konservasi ruang terbuka hijau atau kebersihan lingkungan dengan pembangunan drainase serta pembangunan ruang terbuka hijau di perumahan subsidi di Kelurahan jerambah gantung. Untuk transparansi pengelolaan pajak daerah PBB P2 mayoritas masyarakat tidak mengetahui karena masyarakat tidak mengetahui serapan pendapatan PBB P2 berupa PAD yang dialokasikan menjadi APBD itu digunakan untuk apa namun yang dirasakan masyarakat berupa pembangunan fasilitas sarana dan prasarana. Hingga saat ini tidak ada kerjasama antara pemerintah kota Kelurahan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PBB P2 namun antara pemerintah Kota Pangkalpinang dan kelurahan bekerja sama dalam pemanfaatan APBD tersebut melalui program-program untuk kesejahteraan dan pelayanan publik.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara tidak terstruktur oleh Lurah Jerambah Gantung, kasi Pembangunan kelurahan dan ketua RT dapat disimpulkan bahwa pembayaran PBB P2 oleh masyarakat Kelurahan Kelurahan Jerambah Gantung belum maksimal. Dilihat dari tingkat realisasi PBB P2 yang rendah hanya mencapai 41,39% dari target 321 Juta menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti : rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PBB P2; Data objek pajak (NOP) yang belum akurat dan belum maksimal; keterbatasan SDM terlatih dan infrasktur digital.

Perangkat kelurahan telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan kontribusi tersebut dengan melakukan sosialisasi, penagihan manual dan digital, pendistribusian SPPT PBB P2 melalui RT/RW, serta penggunaan sistem digital SIKAP.

Meskipun tingkat realisasi PBB P2 rendah di tingkat kelurahan, kontribusi PBB P2 tetap signifikan dalam mendukung PAD Kota Pangkalpinang yang secara keseluruhan telah melampaui target. Dana dari PBB P2 ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan penataan lingkungan.

### Saran

Peneliti menyarankan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan intensif dan berkelanjutan melalui pertemuan warga dan RT/RW, dengan pendekatan personal agar warga lebih memahami manfaat dan kewajiban pajak.

Segera lakukan pendataan ulang terhadap objek pajak agar NOP sesuai dengan kondisi terkini, termasuk pembaruan NJOP secara adil dan transparan. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pendistribusian dan pembayaran PBB P2 serta lakukan pelatihan literasi digital khususnya bagi warga lanjut usia.

Melibatkan OPD, RT/RW, tokoh masyarakat dan komunitas lokal untuk mendukung penagihan, pemutakhiran data, serta menjembatani aduan masyarakat.

Mempertimbangkan insentif, keringanan, atau mekanisme pengaduan formal bagi warga yang tidak mampu dengan mengevaluasi NJOP yang memberatkan serta, meningkatkan transparansi pengelolaan dana PBB P2 agar masyarakat tahu kontribusinya digunakan untuk apa, misalnya melalui papan informasi, media sosial, dan laporan tahunan yang mudah diakses publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Murniati dkk. 2020. Keterampilan Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Medan: Yayasan Kita Menulis).
- Mulyadi, A. (2020). *Tantangan Administrasi Perpajakan Daerah: Studi pada Sistem PBB-P2*. Jurnal Keuangan Publik, 9(3), 133–141.
- Rahayu, N. (2021). *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Pangkalpinang*. Skripsi. Universitas Bangka Belitung.
- Rizal, T. (2021). *Digitalisasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Administrasi Fiskal, 8(1), 55–67.
- Sari, P. (2020). *Efektivitas Sosialisasi Pajak Daerah di Wilayah Urban*. Jurnal Komunikasi Publik, 6(4), 190–198.
- Soetomo, D. (2023). *Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia: Konsep dan Realitas*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiarto, B. (2022). *Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi Fiskal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Sulaiman, A., & Kurniawan, B. (2021). *Peran Pajak Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*. Jurnal Keuangan Daerah, 13(1), 112–120.
- Sulaiman, A., & Kurniawan, B. (2021). *Peran Pajak Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*. Jurnal Keuangan Daerah, 13(1), 112–120.
- Sutrisno, H. (2016). *Perpajakan dalam Sistem Ekonomi Nasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, H. (2023). *Perpajakan dalam Sistem Ekonomi Nasional*. Jakarta: Salemba Empat.